KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN

2022

PERDAKOT. PASURUAN NO. 8, LD 2022/NO. 8, TLD NO. 8, HLD KOT. PASURUAN HLM. 116

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- : – bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan elemen mendasar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan umum.
 - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Daerah Kota Pasuruan, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan dan Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 1982; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Pasuruan yang meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum; Dalam Perda ini diatur tentang Pengelola Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

- CATATAN : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2022.
- Pada saat perda ini mulai berlaku, Perda No. 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 08 Tahun 2010 tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan
 - Penjelasan : 22 hlm.